

Peningkatan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bumdes (Kasus: Bumdes Mappasitujue Keera, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan)

The Improvement of the Local Economy and Community Empowerment through Bumdes (Case: Bumdes Mappasitujue Keera, Keera District, Wajo Regency, South Sulawesi Province)

Rahmat Senjaya D^{*)}, Mukhlas Ansori

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Dramaga Bogor 16680, Indonesia

^{*)}E-mail korespondensi: rahmat_senjaya@apps.ipb.ac.id

Diterima: 22-07-2022 | Disetujui: 17-09-2022 | Publikasi Online: 19-09-2022

ABSTRACT

As one of the village economic institutions, Bumdes is expected to help develop rural community businesses. Actors within the village government play an active role in empowering Bumdes. This study aims to analyze the role of actors in empowering Bumdes and the relationship between the role of Bumdes in improving the local economy of Keera Village. Informants were selected purposively and respondents were determined by census because the population was small. Furthermore, the relationship between variables was measured through the Spearman rank correlation test. The results of the study found that the role of Bumdes Mappasitujue Keera in increasing the local economy. Bumdes empowerment is supported by the roles and strategies of actors, namely the Head of Keera Village, Director of Bumdes Mappasitujue Keera, and local assistants of Keera Village. The role of the Village Head is felt to be more impactful than the Bumdes director. The Bumdes director plays a role in providing business capital loans to the community, village assistants play a role in assisting the use of business loan loans, while the role of the Keera Village Head is to facilitate government assistance in the form of fertilizer facilitation, fisherman assistance, and aquaculture demonstration plots.

Keywords: local economy, empowerment, the role of Bumdes

ABSTRAK

Sebagai salah satu lembaga ekonomi desa, Bumdes diharapkan dapat membantu pengembangan usaha masyarakat desa. Para aktor dalam lingkungan pemerintah desa berperan aktif dalam memberdayakan Bumdes. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran aktor dalam memberdayakan Bumdes serta hubungan peran Bumdes dalam peningkatan ekonomi lokal Desa Keera. Informan dipilih secara *purposive* dan responden ditentukan secara sensus karena populasinya yang kecil. Selanjutnya, hubungan antar variabel diukur melalui uji korelasi *rank spearman*. Hasil penelitian menemukan tingginya peran Bumdes Mappasitujue Keera terhadap peningkatan ekonomi lokal. Pemberdayaan Bumdes didukung oleh peran dan strategi aktor, yaitu Kepala Desa Keera, Direktur Bumdes Mappasitujue Keera, dan pendamping lokal Desa Keera. Peran Kepala Desa dirasakan lebih berdampak daripada direktur Bumdes. Direktur Bumdes berperan memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat, pendamping desa berperan mendampingi pemanfaatan pinjaman dana usaha, sedangkan peran Kepala Desa Keera memfasilitasi adanya bantuan pemerintah berupa fasilitasi pupuk, bantuan nelayan, serta demplot budidaya perikanan.

Kata kunci: ekonomi lokal, pemberdayaan, peran Bumdes



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University

E-ISSN: 2338-8269 | P-ISSN: 2338-8021

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi permasalahan yang ditangani serius oleh banyak negara. Namun pada saat yang bersamaan telah terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, sehingga kemiskinan semakin meningkat terutama di wilayah pedesaan (Sartika *et al.* 2016). Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait indeks kedalaman kemiskinan tahun 2021 menyebutkan indeks kedalaman kemiskinan terbesar pada bulan maret 2021 ada di wilayah pedesaan, yaitu 2.27%, sedangkan wilayah perkotaan sebesar 1.29% (BPS 2021). Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor satu, yaitu menghapuskan kemiskinan atau *no poverty*.

Penelitian mengenai kemiskinan dan pengentasan kemiskinan seperti tren kemiskinan, bantuan sosial, jaminan sosial, program berbasis masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik berfungsi sebagai dasar memberikan rekomendasi kebijakan serta dukungan lain supaya pemerintah menerapkan program-program untuk mengentaskan kemiskinan melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (Manteiro 2017). Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk melatih kemampuan individu dan komunitas untuk mengenali sumber daya yang dimiliki untuk menemukan solusi atas masalah yang dimiliki. Prinsip pemberdayaan ini pada intinya mendorong individu, kelompok ataupun komunitas menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga mereka mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk mewujudkan masa depan mereka sendiri (Nasdian 2015). Pemberdayaan bertujuan untuk membantu individu, kelompok ataupun komunitas mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang mereka lakukan, termasuk mengurangi permasalahan baik masalah pribadi maupun sosial. Oleh sebab itu dalam rangka mengatasi kemiskinan di pedesaan, hal terpenting yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada di pedesaan agar mampu dan mau untuk bekerja sama melalui berbagai program guna mengurangi indeks kemiskinan yang ada di pedesaan. Program pemberdayaan masyarakat dapat dirancang dengan memanfaatkan sektor-sektor dan program unggulan yang ada di Indonesia, salah satu caranya melalui program peningkatan ekonomi lokal oleh pemerintah.

Negara-negara yang tergabung dalam United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati isu kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial sebagai poin pertama dari tujuh belas tujuan sustainable development goals (SDGs). Cita-cita pengentasan kemiskinan tentunya menjadi keinginan semua bangsa, termasuk Indonesia. Di Indonesia, telah dirumuskan berbagai regulasi untuk mengatur termasuk mengadakan program-program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Berbagai program yang telah dilakukan pemerintah diantaranya Inpres desa tertinggal (IDT), program pembangunan prasarana pendukung daerah tertinggal (P3DT), program pengembangan kecamatan (PPK), program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) telah dilakukan kemudian dilaporkan dan juga melaporkan tujuan program tidak tercapai (Hadi 2010).

Menyadari Indonesia sebagai negara agraris, potensi kemiskinan terletak di daerah pelosok atau desa-desa. Upaya mengatasi kemiskinan telah diperhatikan oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang tersebut melatarbelakangi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain itu, Indonesia juga memiliki program dana desa yang diberikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk desa dapat melakukan pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan desa. Desentralisasi kewenangan pemerintah dan masyarakat desa dalam melakukan akselerasi pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat secara mandiri.

Saat ini, pemerintah pusat telah memberikan keleluasaan kepada daerah hingga level desa untuk melakukan pembangunan secara mandiri. Amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat diperhatikan secara serius dengan adanya tenaga ahli pendamping desa dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Tenaga pendamping desa memiliki tugas untuk mendampingi, mengarahkan dan melakukan pengorganisasian masyarakat. Berbagai program yang direalisasikan di antara program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pencegahan *stunting*, penanganan covid-19, program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), pendataan SDGs desa, dan program lainnya.

Berkaitan dengan lokasi penelitian ini yaitu di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, kasus yang dibahas adalah program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah bersama tenaga pendamping desa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Dengan penelitian ini, dilakukan analisis peran aktor terhadap pemberdayaan Bumdes *Mappasitujue Keera* di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian menganalisis program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi oleh Bumdes *Mappasitujue Keera* terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai petani tambak (ikan bandeng dan rumput laut). Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data terkait dampak keberadaan Bumdes *Mappasitujue Keera* terhadap peningkatan ekonomi lokal di Desa Keera, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Hal menarik lainnya adalah untuk mengetahui bagaimana program Bumdes *Mappasitujue Keera* dapat terlaksana, serta mengetahui program seperti apa yang mampu meningkatkan perekonomian lokal masyarakat. Dengan demikian, program Bumdes *Mappasitujue Keera* dievaluasi serta menganalisis peran aktor dan *stakeholder* yang berkontribusi dalam keberhasilan Bumdes.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimana karakteristik masyarakat Desa Keera yang diberdayakan Bumdes *Mappasitujue Keera*? (2) apa peran dan jenis unit usaha Bumdes *Mappasitujue Keera* dalam peningkatan ekonomi lokal masyarakat Desa Keera? (3) bagaimana hubungan peran Bumdes *Mappasitujue Keera* terhadap peningkatan ekonomi lokal? (4) siapa aktor dan *stakeholder* yang berperan dalam keberhasilan program peningkatan ekonomi lokal?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Keera, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja dengan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Wajo selaku penyandang dana beasiswa yang diterima peneliti selama di IPB. Penentuan lokasi penelitian dipilih dengan metode *purposive* yang didasari pada pertimbangan yaitu adanya aktivitas pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan di Desa Keera. Salah satu program unggulan yang dilaksanakan adalah pendampingan pengembangan Bumdes. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam lima bulan, terhitung dari Februari – Juni 2022.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode campuran atau *mixed method*, atau dikenal dengan penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Menurut Grey DE (2009), metode kuantitatif dan kualitatif digunakan secara bersamaan atau secara bergantian yang dipolakan dalam empat skema, salah satunya adalah melakukan eksplorasi data dengan metode kualitatif, kemudian menggunakan kuesioner dengan metode kuantitatif. Penelitian dimulai dengan metode kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian yang kemudian dapat dilanjutkan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur peran Bumdes dan dampaknya terhadap masyarakat. Data kuantitatif tersebut didapatkan melalui pendekatan kuantitatif menggunakan metode sensus. Instrumen metode sensus menggunakan kuesioner yang dapat mengumpulkan data dan informasi dari responden. Kuesioner diisi oleh para responden yang merupakan masyarakat Desa Keera dengan kriteria khusus atau kriteria yang telah ditetapkan peneliti.

Populasi responden merupakan masyarakat Desa Keera yang bermitra atau dibina oleh Bumdes *Mappasitujue Keera* pada rentang tahun 2016–2021. Asumsi rentang tahun tersebut adalah telah melalui banyak waktu terlibat bersama Bumdes serta mengetahui dan merasakan dampak keberadaan Bumdes. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu yang merupakan masyarakat Desa Keera, Kecamatan Keera.

Penentuan jumlah responden mengacu pada data pengurus Bumdes *Mappasitujue Keera* terkait data masyarakat yang pernah atau sedang bermitra dengan Bumdes *Mappasitujue Keera*. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bermitra dengan Bumdes pada unit perguliran modal usaha. Jumlah keseluruhan atau populasi masyarakat pada unit perguliran modal usaha Bumdes adalah sebanyak tiga puluh orang. Populasi tersebut dinyatakan tidak banyak, penelitian ini tidak menggunakan metode pengambilan sampel karena semua populasi digunakan sebagai responden. Sehingga, penentuan responden dilakukan secara sensus dengan metode *non probability sampling*. Selanjutnya, pemilihan informan dilakukan secara *purposive*. Informan pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Keera, pendamping lokal desa, pendamping desa tingkat Kecamatan Keera, Kepala Desa Keera, pengurus Bumdes *Mappasitujue Keera*, anggota DPRD Kab. Wajo, dan Bupati Wajo.

Pengambilan data kuesioner dilakukan secara langsung mendatangi responden dan mengisi kuesioner melalui google form yang disediakan melalui tablet (*Ipad Air 3*). Proses pengambilan data kuesioner memerlukan pendekatan persuasif kepada masyarakat Desa Keera dengan asumsi masyarakat tersebut lebih terbuka dan menerima peneliti apabila dikenali sebagai satu entitas yang sama. Peneliti membantu masyarakat mengisi kuesioner dengan membacakan isi kuesioner dalam Bahasa Bugis. Kuesioner disusun dengan pernyataan – pernyataan berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun, yakni pernyataan untuk mengetahui bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan Bumdes yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wajo bersama tenaga pendamping desa. Pernyataan tersebut meliputi identifikasi pendekatan pengembangan masyarakat yang digunakan, pernyataan yang mengukur dampak pengembangan masyarakat yang dapat meningkatkan ekonomi lokal, dan mengidentifikasi jenis dan bentuk program pengembangan masyarakat yang dapat meningkatkan ekonomi lokal.

Sedangkan data kualitatif didapatkan melalui wawancara mendalam untuk menambah pemahaman terkait masalah yang dihadapi pelaksanaan program dan penerima program, serta solusi yang diharapkan terkait masalah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan wawancara menggunakan panduan pertanyaan dan pengamatan secara langsung. Effendi dan Tukiran (2014) menjelaskan bahwa penjelasan tentang hubungan – hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis dikenal sebagai jenis penelitian eksplanatori atau *explanatory research*.

Data kualitatif dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam bersama informan yang berasal dari Pemerintah Desa Keera, Bumdes, pendamping lokal desa, pendamping desa tingkat kecamatan, dan masyarakat Desa Keera. Proses wawancara direkam menggunakan aplikasi perekam suara, rekaman wawancara dituliskan secara jelas dan lengkap setiap kata dan kalimat ke dalam catatan lapangan wawancara mendalam. Setelah data kualitatif dikumpulkan, data direduksi kemudian disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan teks naratif. Hasil data kualitatif disusun secara deskriptif untuk dapat menjelaskan data, fakta, dan informasi lain secara akurat.

Pengelolaan data kuantitatif dilakukan dalam dua bagian sesuai dengan jenis datanya. Pertama, analisis data statistika deskriptif yang menyusun data menjadi jumlah, persen, dan rata-rata untuk mendeskripsikan data kuantitatif dari tiga variabel. Data X1 (karakteristik masyarakat), yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan domisili. Data X2 (peran Bumdes), yaitu pembentukan Bumdes, modal operasional Bumdes, jenis usaha, pengelolaan, organisasi, dan pembinaan. Data Y (peningkatan ekonomi lokal), yaitu aspek lokalitas, aspek ekonomi, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan. Kedua, analisis data statistik inferensial dengan menggunakan uji korelasi rank spearman pada data yang termasuk skala ordinal dilakukan untuk menguji hubungan antara X2 (peran Bumdes) dengan Y (peningkatan ekonomi lokal).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Keera memiliki dua belas desa dengan keseluruhan wilayah seluas 368.36 km². Salah satunya adalah Desa Keera yang memiliki luas 23.15 Km² yang menjadi lokus penelitian ini. Desa Keera terletak pada garis lintang 3.8339 dan garis bujur 120.3409, serta berada dua belas meter dari permukaan laut. Jarak dari kantor Desa Keera ke Ibukota Kecamatan Keera berjarak dua km dan enam puluh dua km ke Ibukota Kabupaten Wajo (Sengkang). Desa Keera diklasifikasikan terletak di wilayah tepi laut, hal tersebut tentunya mendukung masyarakat memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan perairan atau laut.

Desa Keera memiliki nama yang unik. Hal ini dikarenakan nama Desa Keera sama dengan nama kecamatan, yaitu Kecamatan Keera. Untuk mengetahui alasan nama wilayah menggunakan kata “Keera”, peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat.

“...sebenarnya dulu disini kan Kecamatan Pitumpanua semua. Mulai dari Kelurahan Ballere yang di depan itu sampai disini, Desa Keera Kecamatan Pitumpanua semua. Cuma karena pemekaran kemarin, jadi dua kecamatan, Kecamatan Pitumpanua dan Kecamatan Keera. Jadi kawasan kelurahan Ballere itu kawasan Desa Keera pada awalnya, karena dimekarkan, maka di depan dijadikan kelurahan (Ballere), disini tetap Desa Keera. Desa tidak berganti nama, cuma Kecamatan yang ambil namanya... (Masyarakat, Masthura, 25)

Menurut masyarakat Desa Keera, penggunaan kata “Keera” diawali dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Wajo. Desa Keera pada waktu itu merupakan wilayah dari Kecamatan Pitumpanua (kecamatan sebelah utara Kecamatan Keera), atau dengan pemahaman lain bahwa Desa Keera merupakan wilayah Kecamatan Pitumpanua. Setelah terjadi pemekaran, Desa Keera sudah beralih menjadi wilayah kecamatan lain, kemudian setengah wilayah Desa Keera dijadikan sebagai Kelurahan Ballere yang menjadi pusat kecamatan. pada akhirnya, kecamatan ikut menggunakan kata “Keera” dengan mengikuti nama Desa terdahulu.

Profil Bumdes *Mappasitujue Keera*. Bumdes di Desa Keera memiliki nama Bumdes *Mappasitujue Keera*. Bumdes *Mappasitujue Keera* memiliki makna saling mengalah demi tujuan bersama dapat tercapai serta saling melengkapi kebutuhan anggota masyarakat. Terbentuk dengan Peraturan Desa (Perdes) nomor 04 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bumdes. Bumdes *Mappasitujue Keera* memiliki SK pengelola 10/KPTS/DK/XII/2017, serta Bumdes *Mappasitujue Keera* memiliki penyertaan modal dengan dasar Perdes nomor 02 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Keera pada Bumdes. Jumlah pengurus Bumdes *Mappasitujue Keera* dikelola oleh dua, tidak termasuk karyawan. Saat ini, direktur Bumdes *Mappasitujue Keera* dipimpin oleh direktur Bumdes bernama Naharuddin dan bendahara bernama Nur Asmi, sedangkan jabatan sekretaris dinyatakan tidak ada karena mengundurkan diri, alasan pengunduran diri sekretaris Bumdes dijelaskan pada Bab pembahasan tentang evaluasi kinerja Bumdes *Mappasitujue Keera*.

Terbentuknya Bumdes *Mappasitujue Keera* dilalui dengan proses yang panjang karena melibatkan partisipasi lapisan masyarakat dan Pemerintah Desa Keera. Sesuai yang tertulis di AD/ART, bahwa pembentukan Bumdes *Mappasitujue Keera* dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat tersebut harus dilandasi oleh adat istiadat dan budaya masyarakat Desa Keera. Tata cara pembentukan Bumdes dijelaskan pada Bab III AD/ART Bumdes Desa Keera, yaitu Bumdes *Mappasitujue Keera* dibentuk dan disepakati melalui musyawarah Desa Keera, selanjutnya hasil musyawarah tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa Keera bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan peraturan desa tentang pendirian Bumdes.

Struktur organisasi pada empat menjelaskan adanya jabatan kepengurusan yang berbeda, yaitu penasehat atau pembina, direktur Bumdes, bendahara, dan sekretaris. Jabatan penasehat atau pembina Bumdes *Mappasitujue Keera* dijabat oleh Kepala Desa Keera dan Badan Perwakilan Desa Keera. Berdasarkan tugas dan fungsinya, penasehat Bumdes berfungsi untuk mengawasi segala aktivitas Bumdes dari penyertaan modal, unit usaha, dan pelaporan pertanggungjawaban Bumdes. Direktur Bumdes *Mappasitujue Keera*, diembankan amanah untuk memimpin keberlangsungan unit usaha Bumdes berdasarkan SK pengangkatan jabatan direktur Bumdes oleh Kepala Desa Keera. Bendahara dan sekretaris masing – masing di embankan amanah dalam administrasi unit usaha dan pembukuan keuangan.

*“ ... aki sengkang, nappagguruki madupa – dupang rekeng napaguruki, bahkang engka pole Makassar tentang Bumdes. Napagguruki, makkessing carana. Bahkan ero nak najanci ki meleng sertifikat, alhamdulillah, makessing cara maleki materi, makkunrai na burane ero wettu e tentang cara – cara pengelolaan Bumdes. Ero maressa naggurui anggota e, itu akutansi, pencatatan, engkamaneng ni anggota e makkeda maressa ladde ha iye laba untung rugi ... ” (Direktur Bumdes *Mappasitujue Keera*, Naharuddin, 55)*

Sejak awal menjabat sebagai direktur Bumdes *Mappasitujue Keera*, Bapak Naharuddin, mengikuti berbagai pelatihan kepengurusan Bumdes. Hal tersebut diikuti dengan adanya motivasi dapat meningkatkan kapasitas dirinya sebagai pengurus. Salah satu materi yang sangat sukar untuk dipahami adalah akuntansi, karena mengandung banyak angka – angka dan perhitungan yang jarang ditemukan oleh dirinya.

Karakteristik Masyarakat. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tergabung dalam unit usaha Bumdes *Mappasitujue Keera*. Responden tersebar dalam empat dusun yang ada di Desa Keera. Responden dipilih menggunakan metode sensus, yaitu menggunakan seluruh populasi atau masyarakat Desa Keera yang bermitra dengan Bumdes *Mappasitujue Keera*. Penentuan karakteristik responden didasari ilmu sosiodemografi. Adioetomo dan Samosir (2013) menyatakan bahwa sosiodemografi merupakan ilmu yang memberi an secara menyeluruh tentang perilaku penduduk dan kondisi dampak ekologis di lingkungan masyarakat, meliputi beberapa komponen yaitu

jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, serta domisili. Karakteristik dalam penelitian ini diantaranya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan domisili.

Tabel 1. Jumlah responden berdasarkan karakteristiknya pada tahun 2022

Karakteristik	Kategori	Jumlah
Jenis kelamin	Laki-laki	21
	Perempuan	9
Usia	18 – 30 tahun	2
	31 – 50 tahun	18
	> 51 tahun	10
Tingkat pendidikan	Tidak tamat SD	6
	Tamat SD	12
	Tamat SMP	8
	Tamat SMA	4
	D3/S1	0
Pekerjaan	Nelayan	21
	Wirausaha	9
Domisili	Dusun Babana	16
	Dusun Duppawalie	4
	Dusun Benteng	5
	Dusun Lawatanae	5

Hubungan Karakteristik Masyarakat terhadap Peningkatan Ekonomi Lokal. Karakteristik responden yang merupakan mitra Bumdes *Mappasitujue Keera* terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan domisili. Adanya lima variabel tersebut dibagi menjadi dua golongan data, yaitu ordinal dan nominal. Data yang termasuk ordinal adalah usia dan tingkat pendidikan, sedangkan data yang termasuk nominal adalah jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan domisili. Data ordinal diolah menggunakan uji korelasi *rank spearman* untuk melihat hubungan usia dan tingkat pendidikan terhadap peningkatan ekonomi lokal di Desa Keera. Data nominal diolah menggunakan jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan domisili terhadap peningkatan ekonomi lokal di Desa Keera.

Tabel 2. Nilai koefisien korelasi dan signifikansi antara karakteristik responden dengan peningkatan ekonomi lokal di Desa Keera

Karakteristik Responden	Peningkatan Ekonomi Lokal di Desa Keera							
	Lokalitas		Ekonomi		Sumberdaya manusia		Kelembagaan	
	Koef. Korelasi	Sig.	Koef. Korelasi	Sig.	Koef. Korelasi	Sig.	Koef. Korelasi	Sig.
Usia	-.234	.212	-.351	.057	-.383*	.037	-.337	.069
Tingkat pendidikan	.358	.052	.492*	.006	.487**	.006	.462*	.010

Ket: ** Signifikan pada selang kepercayaan 99% dan *Signifikan pada selang kepercayaan 95%

Usia merupakan lama hidup responden yang dihitung mulai hari dan tanggal lahir hingga hari dan tanggal penelitian dilakukan yang dinyatakan dalam tahun. Usia pada penelitian ini dikategorikan menjadi tiga, yaitu dewasa awal, dewasa menengah, dan dewasa akhir. Hasil uji korelasi *rank spearman* menunjukkan bahwa usia memiliki hubungan nyata dengan peningkatan ekonomi lokal pada variabel sumber daya manusia, dengan nilai signifikansi $0.037 < 0.05$. Penelitian ini mencatat ada delapan belas responden yang mendominasi mitra dengan Bumdes *Mappasitujue Keera*. Kategori usia tersebut adalah usia dewasa menengah yang berarti responden memiliki usia produktif untuk bekerja ataupun mengelola sumber daya alam yang ada.

“ ... ndak mi disini. Nda sama mi dulu – dulu, kalau dulu terkenal itu Desa Keera banyak kenakalan. Tapi sekarang alhamdulillah banyak mi perubahannya. Di desa Keera ini sedikit sekali atau hampir tidak ada pengangguran. Apalagi kalo anak muda, yang usia 30 an itu sudah pintar cari uang. Karena di Keera ini yang penting mau kerja, pasti dapat uang, karena potensi desa disini banyak sekali ...” (*Masyarakat, Masthura, 24*)

Tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan yang pernah diikuti responden dalam struktur formal ataupun non formal hingga hari penelitian dilakukan. Tingkat pendidikan dalam penelitian ini

dikategorikan menjadi lima, yaitu tidak tamat SD. Tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan D3/S1. Hasil uji korelasi *rank spearman* menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan nyata dengan peningkatan ekonomi lokal pada variabel ekonomi dan sumber daya manusia, dengan nilai signifikansi yang sama, yaitu $0.006 < 0.05$. Blakely dan Bradshaw (2002) menyatakan bahwa konsep baru peningkatan ekonomi lokal pada variabel ekonomi dan sumberdaya lebih mementingkan pendidikan untuk berkembang. Pada aspek ekonomi, masyarakat tidak lagi berpikir tentang usaha berskala besar melakukan ekspor produk agar menggunakan tenaga kerja yang banyak, namun lebih mengarah ke cara berpikir bagaimana menciptakan kerja sama perusahaan dari tingkat regional dan peluang usaha yang lebih banyak. Pada aspek sumber daya, masyarakat tidak lagi berpikir tentang bekerja pada perusahaan dengan harapan upah meskipun kecil, saat ini masyarakat lebih dituntut untuk meningkatkan kapasitas diri dan mempelajari teknologi dengan baik agar mendapat gaji upah yang tinggi.

Tabel 3. Nilai koefisien korelasi chi-square dan signifikansi antara karakteristik responden dengan peningkatan ekonomi lokal di Desa Keera

Karakteristik Responden	Peningkatan Ekonomi Lokal di Desa Keera							
	Lokalitas		Ekonomi		Sumberdaya manusia		Kelembagaan	
	<i>Chi-square</i> (x^2)	Sig.	<i>Chi-square</i> (x^2)	Sig.	<i>Chi-square</i> (x^2)	Sig.	<i>Chi-square</i> (x^2)	Sig.
Jenis Kelamin	6.746	.456	5.601	.231	6.984	.322	7.307	.199
Pekerjaan	6.746	.456	5.601	.231	6.984	.322	7.307	.199
Domisili	25.294	.235	14.438	.274	21.313	.264	19.472	.193

Ket: ** Signifikan pada selang kepercayaan 99% dan *Signifikan pada selang kepercayaan 95%

Tabel 3 menyatakan bahwa jenis kelamin, pekerjaan, dan domisili tidak memiliki hubungan korelasi nyata dengan aspek lokalitas, ekonomi, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *Asymp. Sig* > 0.05. Tidak adanya hubungan antara jenis kelamin, pekerjaan, dan domisili dengan aspek lokalitas, ekonomi, sumber daya manusia, dan kelembagaan didukung pernyataan oleh informan.

“ ... dengan berbagai potensi yang kami hadirkan, semua masyarakat dari muda sampai tua, dan dimana pun masyarakat itu tinggal. Mereka dapat mengelola potensi Desa Keera menjadi kekuatan ekonomi keluarga ... ” (Kepala Desa Keera, Syamsurida, 55)

Peran dan Unit Usaha Bumdes Mappasitujue Keera

Penelitian ini menemukan adanya keberhasilan Bumdes terhadap peningkatan ekonomi lokal berdasarkan uji korelasi *rank spearman* peran Bumdes terhadap peningkatan ekonomi lokal. Terlaksananya peran Bumdes Mappasitujue Keera secara baik dilakukan dengan adanya sinergi pemberdayaan dari Pemerintah Desa Keera dan keberdayaan masyarakat Desa Keera. Sarah dan Stave (1997) membahas tentang adanya teori *Actors* (*authority, confidence dan competence, trust, opportunities, responsibilities, dan support*) yang memiliki pandangan bahwa masyarakat merupakan sebuah subjek yang berkuasa penuh pada kebebasan, keputusan, ide, serta tindakan mereka sendiri. Teori tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan dapat terjadi apabila masyarakat berdaya secara internal dan eksternal, serta adanya tindakan aktor dari pemerintah dan non pemerintah. Sehingga, peran Bumdes dapat terlaksana dengan baik karena masyarakat Desa Keera menerima Bumdes Mappasitujue Keera dengan sikap ingin diberdayakan. Pada bagian ini dijelaskan lebih mendalam tentang pembahasan karakteristik responden dan jenis unit usaha yang dilakukan Bumdes Mappasitujue Keera dalam memberdayakan usaha responden.

Hubungan Peran Bumdes Mappasitujue Keera terhadap Peningkatan Ekonomi Lokal. Peran Bumdes Mappasitue Keera diukur menggunakan empat aspek peningkatan ekonomi lokal. Berdasarkan data responden yang merasakan peran Bumdes Mappasitujue Keera dihitung menggunakan uji korelasi *rank spearman* dengan empat aspek peningkatan ekonomi lokal.

Tabel 4. Nilai koefisien korelasi dan signifikansi antara peran Bumdes *Mappasitujue Keera* dengan peningkatan ekonomi lokal di Desa Keera

Peran Bumdes	Peningkatan Ekonomi Lokal di Desa Keera							
	Lokalitas		Ekonomi		Sumberdaya manusia		Kelembagaan	
	Koef. Korelasi	Sig.	Koef. Korelasi	Sig.	Koef. Korelasi	Sig.	Koef. Korelasi	Sig.
Pembentukan	.795**	.000	.807**	.000	.813**	.000	.739**	.000
Modal	.729**	.000	.630**	.000	.545**	.002	.667**	.000
Jenis Usaha	.840**	.000	.823**	.000	.770**	.000	.746**	.000
Pengelolaan	.798**	.000	.752**	.000	.710**	.000	.750**	.000
Organisasi	.713**	.000	.683**	.000	.678**	.000	.645**	.000
Pembinaan	.815**	.000	.809**	.000	.827**	.000	.813**	.000

Ket: ** Signifikan pada selang kepercayaan 99% dan *Signifikan pada selang kepercayaan 95%

Output di atas diketahui nilai signifikan (2-tailed) sebesar 0.000, hal tersebut dapat dipahami bahwa variabel X2 atau peran Bumdes dan variabel Y atau peningkatan ekonomi lokal memiliki hubungan yang signifikan karena memiliki nilai signifikansi kurang dari 0.05. Selain itu, diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0.545** - 0.840** yang berarti tingkat kekuatan korelasinya adalah hubungan kuat dan hubungan sangat kuat. Angka koefisien relasi di atas bernilai positif, maka arah hubungan variabelnya, yaitu positif.

Secara rinci, variabel pembentukan Bumdes dengan variabel lokalitas, ekonomi, sumber daya manusia diperoleh nilai korelasinya adalah hubungan sangat kuat, dengan variabel kelembagaan memiliki kekuatan korelasi adalah hubungan kuat. Variabel modal Bumdes dengan variabel lokalitas, ekonomi, sumber daya manusia, dan kelembagaan diperoleh nilai korelasi pada tingkat kekuatan korelasinya adalah hubungan kuat. Variabel jenis usaha dengan variabel lokalitas, ekonomi, sumber daya manusia diperoleh nilai korelasinya adalah hubungan kuat, dengan variabel kelembagaan memiliki kekuatan korelasi adalah hubungan sangat kuat.

Variabel pengelolaan Bumdes dengan variabel lokalitas diperoleh nilai korelasinya adalah hubungan sangat kuat, dengan variabel ekonomi, sumber daya manusia, dan kelembagaan diperoleh nilai korelasi pada tingkat kekuatan korelasinya adalah hubungan kuat. Variabel organisasi dengan variabel lokalitas, ekonomi, sumber daya manusia, dan kelembagaan diperoleh nilai korelasi pada tingkat kekuatan korelasinya adalah hubungan kuat. Variabel pembinaan Bumdes dengan variabel lokalitas, ekonomi, sumber daya manusia, dan kelembagaan diperoleh nilai korelasi pada tingkat kekuatan korelasinya adalah hubungan kuat.

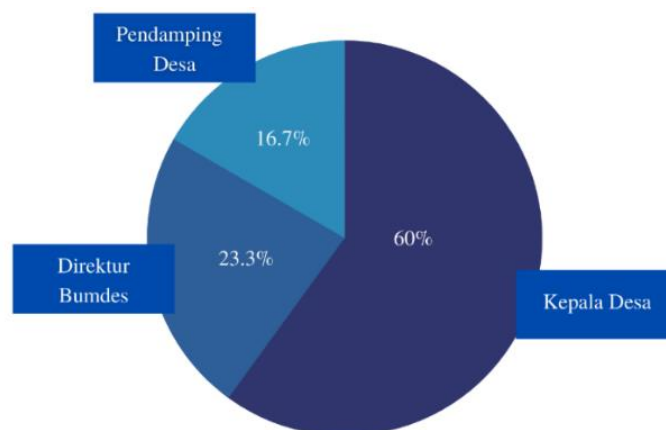
Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Ridwan (2014) menyatakan ada enam prinsip pengelolaan Bumdes, yaitu kooperatif, partisipatif, emansipasi, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Prinsip tersebut telah terlaksana dalam peran Bumdes untuk membantu pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Keera. Prinsip partisipatif diketahui melalui peran Bumdes *Mappasitujue Keera* berpartisipasi dalam setiap forum Bumdes seperti forum pembentukan Bumdes, forum penentuan unit usaha, dan forum musyawarah lainnya. Prinsip kooperatif dinyatakan dalam peran pengelolaan unit usaha Bumdes *Mappasitujue Keera* seperti apabila peminjam modal usaha tidak mengembalikan pinjaman sesuai waktu, pengurus Bumdes memberikan kebijaksanaan untuk menunda tempo pembayaran. Prinsip transparan dan akuntabel dinyatakan dalam peran organisasi Bumdes *Mappasitujue Keera* yang melaksanakan pembukuan keuangan, pelaporan pertanggungjawaban dana Bumdes, serta transparansi kepada semua mitra Bumdes. Selain itu, prinsip emansipasi dinyatakan dengan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha agar pinjaman modal masyarakat dimanfaatkan dengan baik.

Peran Aktor terhadap Peningkatan Ekonomi Lokal melalui Pemberdayaan Bumdes *Mappasitujue Keera*

Sebuah penelitian, Firdaus (2017) yang menganalisis strategi dan peran aktor dalam pemberdayaan Bumdes yang menyatakan adanya peran aktor didasari oleh kepentingan tertentu. Hal tersebut menjadi dasar agar penelitian ini dapat menganalisis peran aktor pemberdayaan Bumdes *Mappasitujue Keera*. Penelitian ini menyisipkan pertanyaan terbuka pada kuesioner yang menanyakan aktor yang berpengaruh pada keberhasilan Bumdes *Mappasitujue Keera*. Ada tiga aktor yang ditawarkan untuk dipilih, yaitu kepala Desa Keera, direktur Bumdes *Mappasitujue Keera*, dan pendamping lokal Desa

Keera. Ketiga aktor tersebut masing – masing memiliki peranan yang berbeda, karena dibatasi oleh kapasitas dan wewenang yang berbeda.


Terdapat asumsi – asumsi yang digunakan untuk mengkategorikan seorang aktor memiliki peranan lebih bagi keberhasilan Bumdes. Asumsi yang digunakan untuk kepala Desa Keera adalah adanya kapasitas dan wewenang yang dimiliki sebagai pemerintah desa dalam mengatur segala aktivitas sosial dan ekonomi di Desa Keera. Asumsi yang digunakan untuk direktur Bumdes *Mappasitujue Keera* adalah adanya kapasitas dan wewenang secara sah dalam badan usaha untuk memimpin usaha yang dijalankan Bumdes. Selanjutnya, asumsi yang digunakan untuk pendamping lokal Desa Keera adalah adanya tugas yang diemban melalui Kementerian Desa PDTT sebagai fasilitator atau pendamping pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sekaligus mendampingi masyarakat untuk hal – hal pemberdayaan.



Gambar 1. Diagram hasil survei peran aktor yang berpengaruh pada keberhasilan Bumdes *Mappasitujue Keera* menurut masyarakat di Desa Keera **Sumber:** Interpretasi data primer hasil wawancara

Data yang telah diolah dari tiga puluh pendapat responden menunjukkan bahwa Kepala Desa Keera memiliki peran lebih dibandingkan direktur Bumdes ataupun pendamping lokal desa. Sebanyak delapan belas responden atau enam puluh persen menyatakan Kepala Desa sebagai aktor yang berperan lebih dalam keberhasilan Bumdes. Sebanyak tujuh orang atau 23.3 persen responden menyatakan direktur Bumdes *Mappasitujue Keera* sebagai aktor yang berperan lebih dalam keberhasilan Bumdes. Sebanyak lima orang atau 16.7 persen responden yang menyatakan pendamping lokal Desa Keera sebagai aktor yang berperan lebih dalam keberhasilan Bumdes.

Secara umum, program Bumdes memiliki sumber modal dari alokasi dana desa dan pemerintah desa memberikan wewenang kepada Bumdes untuk mengelolanya. Semangat gotong royong membangun Bumdes di Desa Keera tentunya diikuti peran yang berbeda pada tiap aktor. Beberapa pernyataan masyarakat terkait peran yang dirasakan dari adanya tiga aktor tersebut.



Kepala Desa: "... Mengadakan demplot perikanan terpadu; memberikan contoh budidaya perikanan yang baik kepada masyarakat; Memberikan contoh pertanian terpadu; memfasilitasi bantuan pupuk ..."

Pendamping Lokal Desa: "... mendampingi masyarakat untuk segala keperluan sosial; mengadakan pelatihan – pelatihan usaha: mengajari kami mengelola pinjaman modal usaha ..."

Direktur Bumdes: "... memotivasi dan memberikan modal; Pengembangan produk dan pemasaran ..."

Gambar 2. Opini responden terhadap aktor. **Sumber:** Interpretasi data primer hasil wawancara

Peran Kepala Desa Keera terhadap Bumdes *Mappasitujue Keera*. Kepala Desa Keera memiliki *privilege* untuk melakukan pembangunan di Desa Keera. Adanya sumber daya aset, wewenang, dan kekuasaan menjadi *privilege* untuk Kepala Desa Keera. Beberapa sumber daya yang dimilikinya adalah hamparan tambak yang secara pribadi cukup luas untuk dikelola secara maksimal. Bukti keberhasilannya dijadikan percontohan bagi masyarakat Desa Keera. Adanya wewenang sebagai

Kepala Desa memberikan ruang untuk program – program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung baik di Desa Keera.

“ ... kalo pendampingan di Desa Keera itu banyak kesannya itu. Apalagi kepala desanya itu orangnya ramah sama kita semua, selalu mendukung program – program yang masuk di desa nya itu. Di Desa Keera itu masyarakat juga ramah. Perangkat desanya juga disitu, pokoknya heboh disitu kalo kita masuk di desanya. Mungkin adek juga sudah pernah merasakan ...” (Pendamping Lokal Desa Keera, Supardi Rasyid, 35)

Menurut Kepala Desa Keera, masyarakat cenderung tidak dapat menerima pembelajaran secara teori dari pemateri – pemateri yang didatangkan untuk mengedukasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lebih mudah memahami dan percaya apabila dapat melihat langsung hasilnya. Seperti halnya peran pemerintah dengan mengadakan penyuluh pertanian dan perikanan, namun mereka lebih antusias ketika terlibat dalam praktik langsung.

“ ... disanalah kami tunjukkan bahwa ini area sederhana dan terbatas tapi mampu menghasilkan dan menghadirkan beberapa komoditi yang ada di dalamnya. Itulah sampai bapak bupati memberikan dukungan support bukan saja di Desa Keera, bahkan beberapa setiap kecamatan ada perwakilan desa menjadi ee dijadikan selaku sebagai pertanian terpadu dan inilah seiring dengan program misi dan visinya ...” (Kepala Desa Keera, Syamsurida, 55)



Gambar 3. Peresmian kawasan perikanan Desa Keera. **Sumber:** Arsip Pemerintah Desa Keera

Kepala Desa memahami permasalahan masyarakat, yaitu tidak mudah menerima ilmu penyuluh perikanan secara teori. Solusi yang dipikirkan dan dilaksanakan Kepala Desa Keera adalah menghadirkan contoh nyata kepada masyarakat untuk dapat diaplikasikan kembali pada tambak masing – masing masyarakat. Sesuai dengan pernyataan Nasdian (2015) bahwa pendekatan pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan *people center development* dengan tujuan melakukan kegiatan pemberdayaan dengan berfokus pada kepentingan banyak masyarakat. Kepala Desa Keera dengan berbagai *privilege* yang dimiliki diantaranya wewenang untuk menerima tawaran program pemberdayaan dari luar desa, misalnya program dari dinas perikanan Kabupaten Wajo. Selain itu, Kepala Desa Keera juga memiliki tambak ikan bandeng secara pribadi. Dengan hal tersebut, Kepala Desa mampu melakukan eksperimen terhadap tambaknya sendiri. Apabila berhasil, maka diajarkan kepada masyarakat.



Gambar 4. Kepala Desa Keera membagikan (gratis) hasil panen tambaknya kepada masyarakat. **Sumber:** Arsip Pemerintah Desa Keera

Peran Pendamping Desa terhadap Bumdes *Mappasitujue Keera*. Pendamping lokal Desa Keera melaksanakan program pemberdayaan Bumdes *Mappasitujue Keera* sesuai dengan pernyataan Jim Iff (1995) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pemanfaatan sumber daya, pengetahuan, kesempatan, serta keterampilan yang dimiliki masyarakat untuk peningkatan kemampuan dan kapasitas masyarakat maupun kelompok dalam mencapai tujuan hidup berdasarkan partisipasi mereka terhadap program pemberdayaan. Pendamping lokal desa merupakan posisi struktural dari Kementerian Desa PDTT. Posisi pendamping lokal Desa Keera diakui sebagai pendamping kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berbagai kegiatan pemberdayaan dari kebutuhan sosial, ekonomi, bahkan hukum dapat dikerjakan oleh pendamping lokal desa. Pendampingan tersebut tentunya dilakukan kepada masyarakat maupun Pemerintah Desa Keera. Namun, peran pendampingan hanya dilakukan sebatas peningkatan kapasitas kelembagaan maupun kapasitas diri masyarakat tanpa intervensi yang mendalam. Selain itu, pendamping lokal desa juga ikut mendampingi Bumdes, tetapi yang dapat melakukan intervensi adalah Kepala Desa.

“ ... sejauh ini pendamping lokal desa ini sebenarnya perannya cuma fasilitator saja, semacam memberikan arahan kepada pengurus Bumdes misalnya. Kami tidak sampai punya punya kewenangan untuk melakukan intervensi kepada pengurus Bumdes. Itu kewenangan kepala desa untuk mengintervensi ... ” (Pendamping Lokal Desa Keera, Supardi Rasyid, 35)

Implementasi program pemberdayaan yang dilakukan pendamping lokal Desa Keera dinilai independent atau tidak terikat dari kepentingan lain. Kegiatan yang dilakukan pendamping lokal Desa Keera adalah mendampingi penemuan potensi dan pengelolaan atas potensi tersebut. Berbagai aktivitas yang menunjang kegiatan pendamping lokal desa dalam memberdayakan Bumdes sangat bergantung pada Pemerintah Desa. Pendampingan tersebut berguna untuk mendukung masyarakat dalam menemukan potensi Desa Keera dan menggunakan pinjaman modal usaha dengan sebaik – baiknya.

“ ... di desa itu ada inovasi desa. Misalnya di Desa Keera ada “Bandeng Sejahtera” disana itu sudah menghasilkan produk namanya, kerupuk rumput laut dan jus rumput laut. Pemberdayaan lain yang dilakukan pendamping desa adalah pelatihan – pelatihan untuk masyarakat disana. Misalnya pelatihan, termasuk tadi, pelatihan pembuatan jus rumput laut, pelatihan peningkatan kapasitas pengurusnya itu tiap tahun dan dianggarkan di dana desa ... ” (Pendamping Lokal Desa Keera, Supardi Rasyid, 35)

“ ... Jadi keberhasilan suatu Bumdes itu sebenarnya tergantung dari sumber daya manusia kepala desa juga. Kita ini pendamping, bagaimanapun hebatnya kita, ketika pemerintah desa tidak mendukung, mendukung lagi kalo dia tidak paham pasti tidak akan sukses juga. Karena Bumdes ini sebenarnya bukan usaha biasa, usaha luar biasa sebenarnya Bumdes ini. Karena kan ada BUMN, BUMD, Bumdes sama modelnya ... ” (Pendamping Desa, Alimsyah, 55)

Pada dasarnya, berlangsung dan lancarnya kegiatan Bumdes di Desa Keera ditentukan bagaimana kapasitas pengurus Bumdesnya. Secara umum, keberhasilannya ditentukan dengan kerja sama para aktor dengan kapasitas yang dimiliki. Namun pada implementasinya masyarakat dapat merasakan dampak peran yang berbeda – beda dari tiap aktor yang terlibat. Dibandingkan dengan direktur Bumdes *Mappasitujue Keera*, Kepala Desa mampu lebih eksis pada keberhasilan Bumdes karena memiliki hak intervensi sebagai Pemerintah Desa Keera dan *privilege* aset yang mendukung ide visioner dan gerak kepala desa.

Peran Direktur Bumdes terhadap Bumdes *Mappasitujue Keera*. Posisi direktur Bumdes merupakan jabatan yang dihasilkan melalui forum musyawarah desa. Jabatan tersebut disepakati bersamaan dengan fungsinya, yaitu mengelola Bumdes sebagai lembaga ekonomi yang dapat membantu usaha responden desa agar ikut berkembang. Tugas seorang direktur Bumdes *Mappasitujue Keera* juga tertulis jelas pada AD/ART Bumdes yang ditetapkan oleh Kepala Desa Keera. Direktur Bumdes ditugaskan untuk memimpin berlangsungnya unit usaha yang akan atau sedang dikelola Bumdes. Segala bentuk penyelenggaraan aktivitas dan laporan pertanggungjawaban merupakan tugas direktur Bumdes.

Ditinjau dari struktur organisasi Bumdes, posisi direktur Bumdes merupakan pimpinan organisasi Bumdes. Pada semua unit usaha yang dimiliki Bumdes, direktur Bumdes berhak penuh dalam menentukan keberlangsungan unit usaha. Salah satunya pada unit perguliran modal usaha, direktur

Bumdes berperan aktif untuk menentukan kelayakan pemohon pinjaman modal pada Bumdes *Mappasitujue Keera*. Masyarakat harus mampu memiliki pendekatan kekeluargaan yang baik pada direktur Bumdes, karena direktur Bumdes selektif dalam memberikan pinjaman kepada pelaku usaha atau kelompok masyarakat. Selain itu, direktur Bumdes harus mampu memastikan keberhasilan elaborasi program pemberdayaan dari berbagai pihak dapat terlaksana dengan baik.

Faktor lain yang menyebabkan keberhasilan pemberdayaan menurut Daraba (2015), yaitu (1) kemampuan komunikasi antara masyarakat dan *stakeholder* (pemerintah dan swasta) untuk bertukar informasi tentang perencanaan dan realisasi program pemberdayaan masyarakat, (2) kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masyarakat untuk digunakan pada program pemberdayaan masyarakat, (3) kemampuan pemimpin atau mentor dalam menimbulkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program dan memanfaatkan sumberdaya yang ada, (4) kemampuan pelaksana program untuk bergerak dan bekerja sesuai dengan bidang tugas. Secara umum, Direktur Bumdes *Mappasitujue Keera* diketahui mampu mengkomunikasikan aspirasi masyarakat, peran Pemerintah Desa Keera, dan tenaga pendamping lokal Desa Keera. Direktur Bumdes *Mappasitujue Keera* mampu menjelaskan potensi – potensi usaha yang dapat dilakukan Bumdes pada saat wawancara penelitian ini dilakukan. Selain itu, Direktur Bumdes *Mappasitujue Keera* merupakan penduduk asli Desa Keera yang mengenali karakteristik masyarakat dan mampu mengajak masyarakat berpartisipasi dalam program Bumdes.

Hematnya, seorang direktur Bumdes *Mappasitujue Keera* bertugas untuk memimpin keberlangsungan Bumdes secara struktural. Masyarakat atau kelompok masyarakat merasakan dampak atau peran direktur Bumdes lebih nyata pada unit perguliran modal usaha. Pada unit usaha tersebut, permohonan pinjaman modal usaha responden ditentukan oleh direktur Bumdes *Mappasitujue Keera*. Selain itu, peran yang dilakukan oleh direktur Bumdes adalah memastikan peminjam dapat mengembalikan pinjaman modal usaha kepada Bumdes sesuai dengan waktu yang disepakati. Terkait dengan proses pendampingan penggunaan pinjaman modal usaha dilakukan oleh Bumdes bersama pendamping lokal Desa Keera dibawah dengan intervensi Kepala Desa Keera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai Peningkatan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bumdes (kasus: Bumdes *Mappasitujue Keera*, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo) memiliki kesimpulan sebagai berikut:

Karakteristik masyarakat yang diberdayakan oleh Bumdes *Mappasitujue Keera* mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Nelayan dalam penelitian ini diartikan sebagai masyarakat yang mengelola potensi perikanan budidaya (tambak) dan hasil laut seperti ikan dan kepiting di Desa Keera. Dusun Babana merupakan tempat paling banyak didapatkannya responden, hal ini sesuai dengan basis pekerjaan mereka yang memerlukan perairan. Responden dikategorikan pada usia dewasa menengah yang diartikan sebagai usia kategori produktif.

Keberadaan Bumdes *Mappasitujue Keera* melaksanakan perannya termasuk dalam kategori tinggi. Adanya tiga unit usaha Bumdes *Mappasitujue Keera* diketahui mampu meningkatkan perekonomian lokal yang diukur menggunakan empat aspek. Peran Bumdes *Mappasitujue Keera* telah memberikan dampak stabilitas ekonomi pada empat aspek, yaitu aspek lokalitas, ekonomi, sumber daya, dan kelembagaan.

Unit usaha Bumdes *Mappasitujue Keera* dapat membantu pengembangan usaha responden melalui perguliran modal usaha. Kemudahan yang didapatkan masyarakat adalah bunga pengembalian pinjaman yang rendah, yaitu dua persen. Namun, rendahnya bunga pengembalian pinjaman berakibat pada rendahnya pemasukan Bumdes. Selain itu, unit usaha Bumdes lainnya belum memiliki pemasukan yang berarti. Hal tersebut karena belum adanya Perdes yang mengatur tentang tata kelola pemasukan Bumdes yang efisien dan sistem bagi hasil yang jelas.

Keberhasilan program Bumdes *Mappasitujue Keera* diperankan oleh Kepala Desa Keera, Direktur Bumdes *Mappasitujue Keera*, dan pendamping lokal Desa Keera. Ketiga aktor tersebut masing – masing memiliki peran dan tingkat intervensi yang berbeda. Meskipun Bumdes dipimpin oleh seorang direktur, peran Kepala Desa Keera lebih dirasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan perekonomian lokal Desa Keera melalui pemberdayaan Bumdes. Kepala Desa Keera memiliki *privilege* membantu masyarakat seperti, menghadirkan bantuan sosial dan program pemberdayaan yang langsung dirasakan masyarakat serta melancarkan keberlangsungan unit usaha Bumdes. Direktur

Bumdes *Mappasitujue Keera* memegang kendali untuk segala aktivitas dan unit usaha yang direncanakan Bumdes, namun dilakukan atas bantuan dan koordinasi dari Kepala Desa Keera. Selain itu, keberhasilan Bumdes *Mappasitujue Keera* melibatkan pendamping lokal Desa Keera sebagai pihak yang mendampingi berbagai program pemberdayaan masyarakat, khususnya Bumdes. Asumsi keterlibatan pendamping lokal Desa Keera dalam keberhasilan peningkatan ekonomi lokal ini adalah kehadirannya menyeluruh dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam praktik langsung mengelola pinjaman modal usaha sebaik – baiknya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai Peningkatan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bumdes (kasus: Bumdes *Mappasitujue Keera*, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo) terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan saran, diantaranya yaitu:

Temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan seminar atau bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Wajo dan DPRD Kabupaten Wajo untuk memperhatikan Bumdes menjadi lebih baik. Hal tersebut berfungsi sebagai pengingat untuk memberlakukan Bumdes sebagaimana perannya, yaitu sebagai akselerator pemberdayaan ekonomi desa.

Pemerintah Kabupaten Wajo bersama DPRD Kabupaten Wajo perlu melakukan sosialisasi dan pendampingan implementasi Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2021 tentang perkembangan dan perlindungan ekonomi kreatif, serta Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2021 tentang Bumdes. Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan regulasi tentang Bumdes. Untuk melancarkan implementasi regulasi di desa – desa Kabupaten Wajo, diperlukan sebuah Peraturan Bupati Wajo yang membedah regulasi peraturan pemerintah. Peraturan Bupati tersebut akan menjadi pedoman bagi para aktor mengembangkan Bumdes di Kabupaten Wajo. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Wajo dapat menginisiasi terbentuknya forum komunikasi pengurus Bumdes se – Kabupaten Wajo agar memudahkan edukasi, perencanaan kerjasama dan konsolidasi pengurus Bumdes.

Strategi yang dilakukan para aktor dalam memberdayakan dan mengembangkan Bumdes *Mappasitujue Keera* dapat diterapkan di desa – desa lain. Adanya sinergi aktif Kepala Desa Keera, Direktur Bumdes *Mappasitujue Keera*, dan pendamping lokal Desa Keera menjadi kerja sama yang baik dalam mencapai tujuan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi lokal di Desa Keera.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel Bumdes, sehingga dalam satu penelitian dapat membandingkan beberapa strategi pemberdayaan dan pengembangan Bumdes.

Pemerintah Desa Keera sebaiknya merumuskan peraturan desa yang mengakomodir tata pelaksanaan unit usaha Bumdes dan unit usaha perikanan masyarakat di Desa Keera agar menjadi pendapatan asli desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo SM dan Samosir OB. 2013. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta (ID): Salemba Empat.
- Agunggunanto YA, Arianti F, Kushartono EW, Darmawanto. 2016. Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Journal Dinamika Ekonomi Bisnis* 13(1): 67-81.
- Blakely EA dan Edward J. 1994. *Planning Local Economic Development (Theory and Practice)*. California, Sage Publications, Inc.
- Blakely EA, Bradshaw T. 2002. *Planning Local Economic Development Theory and Practice*. Third Edition. Thousand Oaks, London, New Delhi (USA, UK, IN): Sage Publications.
- [BPS] 2021. Indeks Kedalaman Kemiskinan 2021. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] 2021. Kecamatan Keera Dalam Angka 2021. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Daraba D. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program.
- Effendi S dan Tukiran. 2014. *Metode Penelitian Survei*. Cetakan Ketiga Puluh Satu, (edisi revisi). LP3ES.
- Esman MJ dan Uphoff NT. 1984. *Local Organizations: Intermediaries in Rural Development*. Itchaca: Cornell University.

- Firdaus S. 2017. Fenomena *Elite Capture* dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): Studi Kasus strategi bekerjanya kekuasaan elite dalam pengelolaan Bumdes Argosari Desa Pulosari, Kabupaten Pemalang. Universitas Gajah Mada.
- Grey DE. 2009. *Doing Research in the Real World*. New Delhi: Sage Publication.
- Hadi AP. 2010. Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Journal Article - Paper Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya. [http://www.suniscome.50webs.com/data/download/33 Tinjauan Program Pemberdayaan.pdf](http://www.suniscome.50webs.com/data/download/33%20Tinjauan%20Program%20Pemberdayaan.pdf)
- Hayat TJ, Dahwadin, Nurhasan JA, Munawan. 2018. Efektivitas peran bumdes terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Panjalu. *Antaradhin: Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 1 Nomor 1 133-151.
- Ife J dan Frank T. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ife J. 1995. *Community Development: Creating Community Alternative, Vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman Australia. Pty Ltd.
- Ismawati NR. 2020. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Lembaran Masyarakat Journal Pengembangan Masyarakat Islam*.
- Kamaroesid H. 2016. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa [skripsi]. Jakarta: Citapustaka Media Perintis.
- Kurniawan AE. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). *Jurnal Ilmu Pengetahuan, Umroh*.
- Manteiro MCB. 2017. Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. <https://doi.org/10.32511/bisman.v2i2.56>
- Midgley J. 1995. *Social Development. The Development perspective In Social Welfare*. London: Sage Publications.
- Munir dan Risfan. 2007. *Peningkatan Partisipatif: Masalah, Kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan*. Jakarta: Local Governance Support Program (LGSP).
- Nasdian FT. 2015. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Nugroho DA. 2015. Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumahtangga miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (periode Mei 2014-April 2015). *JESP Vol 7 No 2: 79-84*. ISSN 2086-1575.
- Sarah C dan Steve M. 1997. *Perfect Empowerment*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sartika C, Balaka MY, Rumbia WA. 2016. Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi (JE) Vol. 1 (1), April 2016*.
- Setyobakti H. 2017. Identification of Business Enterprise Bumdes Based on Social and Economic Aspect (case study at Bumdes Ijen Lestari Tamasari Vilage District of Banyuwangi). *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen (JEMA) Vol 14 No 2 (2017)*.
- Suryanto R. 2018. *Peta Jalan Bumdes Sukses*. Yogyakarta (ID): PT Syncore Indonesia.
- Umanailo MCB. 2018. Integration of Community Empowerment Models [Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat]. *Proceeding of Community Development*. Volume 2: 268-277; DOI: <https://doi.org/10.30874/comdev.2018.319>
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.
- [UU] Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.